

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018



PEMERINTAH KOTA PALU

Jl. Balai Kota No. 1 Palu

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Palu Tahun 2018 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2017. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2018 merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh gerak penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kota Palu berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016-2021.

Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 telah dilakukan dengan pembahasan rancangan awal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu yang ditindak lanjuti dengan Nota Kesepakatan tentang Persetujuan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021.

Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan melalui pertimbangan sebagai berikut :

1. Nomenklatur Perangkat Daerah Penyesuaian nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017.

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan nomenklatur perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah Sebelum Perubahan RPJMD	Perangkat Daerah Setelah Perubahan RPJMD
1	Dinas Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
4	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5	Dinas Sosial dan PM	Dinas Sosial
6	BKD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pariwisata

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Palu, Tahun 2018

2. Penyesuaian Pendapatan Daerah

Hasil evaluasi terhadap pendapatan daerah Kota Palu, Tahun 2017, dan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Evaluasi Pendapatan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Realisasi 2017 Rp	Realisasi 2018 Rp	2019		2020		2021	
				Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp
				1	PENDAPATAN	1.340.906.455.717,20	1.311.034.004.626,00	1.342.070.229.259,12	2.138.477.838.779,85
1.1	Pendapatan Asli Daerah	283.967.304.727,00	283.255.362.937,00	297.286.349.598,35	185.340.331.559,65	306.082.732.732,54	215.776.148.712,00	315.705.887.714,72	226.797.609.341,00
1.1.1.	Pajak daerah	115.720.000.000,00	115.860.000.000,00	122.967.002.884,00	71.573.557.161,60	127.828.453.028,20	96.255.000.000,00	133.339.600.740,17	101.067.750.000,00
1.1.2.	Retribusi daerah	18.688.992.075,00	17.762.050.285,00	19.327.771.532,94	13.751.205.217,05	20.354.938.017,89	13.227.380.200,00	21.387.643.832,55	13.888.749.210,00
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.536.110.131,00	2.536.110.131,00	2.536.110.131,00	2.536.110.131,00	2.536.110.131,00	2.193.768.512,00	2.536.110.131,00	2.536.110.131,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	147.022.202.521,00	147.097.202.521,00	152.455.465.050,41	97.479.459.050,00	155.363.231.555,45	104.100.000.000,00	158.442.533.011,00	109.305.000.000,00
1.2	Dana Perimbangan	941.175.118.602,00	933.678.495.000,00	945.050.119.130,00	974.440.359.000,00	956.576.156.284,90	938.856.659.150,00	968.258.964.530,62	968.258.964.530,62
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	42.519.429.629,00	58.594.042.000,00	59.179.982.420,00	41.694.519.000,00	59.771.782.244,20	30.331.416.150,00	60.369.500.066,64	60.369.500.066,64
1.2.2.	Dana alokasi umum	671.600.353.000,00	671.600.535.000,00	678.316.540.350,00	706.850.885.000,00	685.099.705.753,50	709.876.943.000,00	691.950.702.811,04	691.950.702.811,04
1.2.3.	Dana alokasi khusus	227.055.335.973,00	203.483.918.000,00	207.553.596.360,00	225.894.955.000,00	211.704.668.287,20	198.648.300.000,00	215.938.761.652,94	215.938.761.652,94
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	115.764.032.388,20	94.100.146.689,00	99.733.760.530,77	978.697.148.220,20	102.545.198.557,30	136.325.825.767,65	107.807.383.485,17	107.807.383.485,17
1.3.1.	Hibah	40.066.280.000,00	3.000.000.000,00		870.600.272.869,00		38.720.722.082,00	-	-
1.3.2.	Dana darurat								
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	68.026.252.388,20	70.395.146.689,00	77.541.260.530,77	56.316.117.351,20	81.418.323.557,30	59.835.874.685,65	85.489.239.735,17	85.489.239.735,17
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	171.500.000,00	1.955.000.000,00	3.255.000.000,00	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
1.3.6.	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	18.750.000.000,00	18.937.500.000,00	51.780.758.000,00	19.126.875.000,00	35.769.229.000,00	19.318.143.750,00	19.318.143.750,00

* : Proyeksi pendapatan perubahan RPJMD Sumber : Bappeda Kota Palu, Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan Kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah Kota Palu berdasarkan kondisi ekonomi Kota Palu, khususnya rata-rata pertumbuhan ekonomi Tahun 2013 hingga Tahun 2016 sebesar 7,83% dan tingkat inflasi 5,52%serta Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah khususnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang terkait

dengan pengelolaan berbasis informasi teknologi perpajakan serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah Kota Palu selama Tahun 2017-2021 sebesar 0,95 %.

Dalam perjalanan periode P-RPJMD, terjadi bencana alam gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami di Kota Palu yang juga berdampak pada pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah Kota Palu mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal tersebut diakibatkan oleh rusaknya hotel, restoran, dan pusat jasa serta ribuan rumah rusak dan lenyap sehingga sebagian sumber potensi pendapatan asli daerah hilang. Olehnya perlu dilakukan penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan pada Tahun 2019-2021. Pada Tahun 2019, pendapatan daerah berjumlah Rp 2.138.477.838.779,85 dimana terdapat hibah dari pemerintah pusat dana stimulan untuk pembangunan rumah rusak sebesar Rp 820.653.280.000, juga hibah dari Pemerintah daerah lain dan pihak swasta. Secara rinci rencana pendapatan daerah Kota Palu Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

3. Penyesuaian tujuan, Sasaran, Indikator sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program hasil pengendalian dan evaluasi terhadap tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program yang tercantum pada RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 menunjukkan beberapa indikator sasaran belum *Specific* (spesifik), *Measureable* (Terukur), *Attainable* (Dapat dicapai), *Result Oriented* (Orientasi Tujuan), *Time Bound* (Batasan Waktu), dan *Continuos Improve* (Perbaikan Berkelanjutan). Hal ini berdampak pada kesulitan dalam mengukur kinerja tahunan dan lima tahunan Pemerintah Kota Palu.

Penyesuaian tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan pagu indikatif disebabkan karena terjadinya gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu pada tanggal, 28 September 2018. Berdasarkan kejadian tersebut, Wali Kota Palu mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Nomor 360/04/01/WK/2018 tanggal 29 September 2018, Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/04/02/WK/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Palu Tahun 2018, tanggal 29 September 2018, Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/030/WK/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Palu Nomor 360/043.32/BPBD/2018 tentang Komposisi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Palu Tahun 2018

4. Perubahan Sistematika Penyusunan RPJMD

Perubahan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 menyesuaikan dengan sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penyusunan RPJMD dari semula sebanyak 10 bab menjadi 9 bab.

1.2. Gambaran Umum Kota Palu

1.2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah seluas 395,06 kilometer persegi berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Secara administratif batas-batas wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Sebelah Barat : Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.

Wilayah Kota Palu terbagi atas 8 (delapan) kecamatan dan 46 (empat puluh enam) kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km² (52,35%) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km² (1,95%).

Tabel 1.3

Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase
1.	Palu Barat	8,28	2,10
2.	Tatanga	14,95	3,78
3.	Ulujadi	40,25	10,19
4.	Palu Selatan	27,38	6,93
5.	Palu Timur	7,71	1,95
6.	Mantikulore	206,8	52,35
7.	Palu Utara	29,94	7,58
8.	Tawaeli	59,75	15,12
Kota Palu		395,06	100,00

Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

Luas wilayah Kota Palu menurut kecamatan diuraikan dalam tabel 2.1, sementara jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Pusat Kota Palu diuraikan dalam tabel 2.2.

Tabel 1.4
Banyaknya Kelurahan Menurut Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan Dan Jarak Ibu Kota Kecamatan Dengan Ibu Kota Palu Tahun 2017

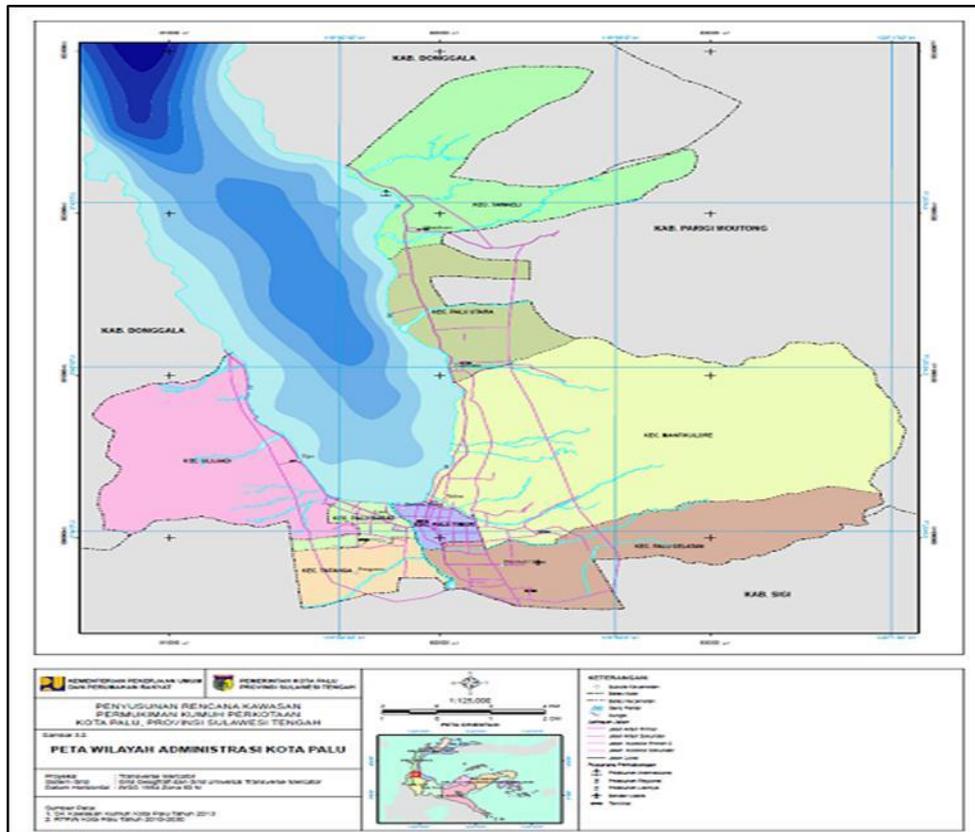
No.	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Ibu Kota	Jarak Melalui Darat
1.	Palu Barat	6	Lere	4
2.	Tatanga	6	Pengawu	6
3.	Ulujadi	6	Tipo	9
4.	Palu Selatan	5	Birobuli Utara	2
5.	Palu Timur	5	Besusu Barat	3
6.	Mantikulore	8	Talise	3
7.	Palu Utara	5	Mamboro	10
8.	Tawaeli	5	Lambara	17
Jumlah		46	-	-

Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2019

Berdasarkan uraian pada tabel 2.2 kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Mantikulore dengan jumlah kelurahan sebanyak 8 (Delapan) kelurahan, sementara jarak terjauh dari pusat kota adalah Kecamatan Tawaeli dengan jarak 17 Km.

1.2.2. Letak, Kondisi Geografis

Kota Palu yang berada pada kawasan dataran Lembah Palu dan Teluk Palu, secara astronomis terletak antara 0^o,36" - 0^o,56" Lintang Selatan dan 119^o,45" - 121^o,1" Bujur Timur. Letak wilayah Kota Palu menurut kecamatan tergambar pada peta Kota Palu sebagaimana Gambar 1.1.



Sumber: Rencana Kawasan Pemukiman Tahun 2019

Gambar 1.1

Peta Administrasi Wilayah Kota Palu

Kota Palu berada di sekitar Garis Khatulistiwa terdiri dari 46 (empat puluh enam) kelurahan. Sebagian besar kelurahan berada pada dataran Lembah Palu yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang pantai Teluk Palu. Letak kecataman Kota Palu menurut posisi pantai diuraikan dalam tabel 2.3.

Tabel 1.5

Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu Tahun 2018

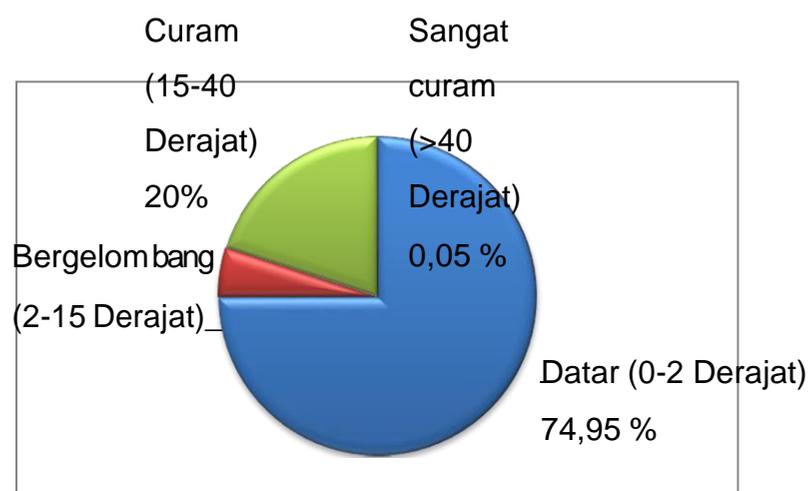
No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Letak	
			Pantai	Bukan Pantai
1	Palu Barat	6	1	5
2	Tatanga	6	-	6
3	Ulujadi	6	4	2
4	Palu Selatan	5	-	5
5	Palu Timur	5	1	4
6	Mantikulore	8	3	5
7	Palu Utara	5	4	1
8	Tawaeli	5	4	1
Kota Palu		46	17	29

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

Kecamatan Tatanga dan Palu Selatan seluruhnya berada di wilayah bukan pantai. Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli hampir semuanya berada pada pesisir pantai, dimana terdapat 4 (empat) kelurahan yang berada pada pesisir pantai dan hanya terdapat 1 (satu) kelurahan yang berada pada wilayah bukan pantai. Demikian halnya dengan Kecamatan Ulujadi yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan, 4 (empat) diantaranya berada disepanjang pesisir pantai dan 2 (dua) lainnya berada pada wilayah bukan pantai.

1.2.3. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kota Palu adalah datar sampai bergelombang dengan beberapa daerah yang berlembah. Karakteristik kondisi topografi wilayah Kota Palu ditunjukkan dalam Gambar 1.2 dan tabel 1.6. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Palu memiliki permukaan yang datar dengan persentase 75 % dari total luas wilayah. Wilayah yang memiliki permukaan bergelombang dengan kemiringan diantara 2-15 derajat sebesar 5%. Wilayah Kota Palu memiliki kemiringan antara 15-40 derajat seluas 20 %. Terdapat 0,05% wilayah dengan kemiringan > 40 derajat. Wilayah dengan kemiringan di atas 15 derajat termasuk dalam kategori curam sehingga perumahan maupun aktivitas rumah tangga lainnya sulit untuk dilakukan pada areal tersebut.



Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2019

Gambar 1.2
Kondisi Kemiringan Wilayah Kota Palu

Tabel 1.6
Ketinggian Kelurahan dari Permukaan Laut
Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Ketinggian dari Permukaan Laut		
			<500	500 – 700	700+
1	Palu Barat	6	6	-	-
2	Tatanga	6	6	-	-
3	Ulujadi	6	6	-	-
4	Palu Selatan	5	4	1	-
5	Palu Timur	5	5	-	-
6	Mantikulore	8	7	1	-
7	Palu Utara	5	5	-	-
8	Tawaeli	5	5	-	-
Kota Palu		46	44	2	-

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2018

Berdasarkan tabel 2.4 diketahui bahwa terdapat 44 (empat puluh empat) kelurahan di Kota Palu yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Kelurahan yang memiliki ketinggian antara 500 – 700 meter dari permukaan laut sebanyak 2 (dua) kelurahan dan tidak terdapat kelurahan yang berada pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan laut.

1.2.4. Kondisi Geologi

Secara umum formasi geologi tanah di Kota Palu ini yang dilaporkan SPRS menunjukkan bahwa formasi geologinya terdiri dari batuan gunung berapi dan batuan terobosan yang tidak membeku (*Inncous Intrusiverocks*). Disamping pula batuan-batuan metamorfosis dan sedimen.

Dataran Lembah Palu diperkirakan cocok untuk pertanian intensif. Geologi tanah dataran Lembah Palu terdiri dari bahan-bahan *alluvial* dan *colluvial* yang berasal dari metamorfosis yang telah membeku. Disamping itu tanahnya kemungkinan bertekstur sedang.

1.2.5. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi

Kota Palu merupakan wilayah yang memiliki karekteristik yang spesifik, sehingga berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang mempunyai dua musim. Kota Palu tidak dapat digolongkan sebagai daerah musim atau disebut sebagai Non Zona Musim.

Wilayah Kota Palu dilalui oleh 11 (sebelas) aliran sungai, melintas melalui semua kecamatan. Kecamatan terbanyak dilalui aliran sungai adalah Kecamatan Matikulore

sebanyak 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela. Terdapat 2 (dua) kecamatan yang hanya dilalui oleh 1 (satu) sungai yaitu Kecamatan Palu Barat yang dilalui Sungai Palu dan Kecamatan Tatanga yang dilalui Sungai Lewara. Sementara 5 (lima) Kecamatan dilalui 2 (dua) sungai yaitu: Kecamatan Ulujadi dilalui Sungai Buvu Mpemata dan Sungai Ngolo, Kecamatan Palu Selatan dilalui Sungai Palu dan Sungai Kawatuna, Kecamatan Palu Timur dilalui Sungai Palu dan Sungai Pondo, Kecamatan Palu Utara dilalui Sungai Taipa dan Sungai Pajeko, serta Kecamatan Tawaeli dilalui Sungai Pantoloan dan Sungai Tawaeli. Tabel 2.5 menunjukkan nama-nama sungai yang mengalir melewati semua Kecamatan yang berada diwilayah Kota Palu.

Tabel 1.7
Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu
Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Palu Barat	Sungai Palu
2.	Tatanga	Sungai Lewara
3.	Ulujadi	Sungai Buvu Mpemata, dan Sungai Ngolo
4.	Palu Selatan	Sungai Palu, dan Sungai Kawatuna.
5.	Palu Timur	Sungai Palu, dan Sungai Pondo
6.	Mantikulore	Sungai Kawatuna, Sungai Pondo, dan Sungai Watutela
7.	Palu Utara	Sungai Taipa dan Sungai Pajeko
8.	Tawaeli	Sungai Pantoloan, dan Sungan Tawaeli

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2018

Kota Palu memiliki karakter klimatologi yang spesifik karena Kota Palu tidak dapat digolongkan daerah musim atau biasa disebut Non Zona Musim. Kondisi iklim Kota Palu dari tahun ketahun selama 5 tahun terakhir cukup stabil, namun pada Tahun 2016 sedikit mengalami perubahan yang cukup berarti. Perubahan yang cukup besar terjadi pada perubahan curah hujan. Curah hujan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dari rata-rata 71,8 mm pada Tahun 2011 menjadi rata-rata 41,06 pada Tahun 2015. Berikut ini gambaran keadaan iklim rata-rata Kota Palu menurut suhu, kelembaban udara, curah hujan dan kecepatan angin.

Tabel 1.8
Keadaan Iklim Rata-Rata Kota Palu Tahun 2014-2018

Rata-rata	2014	2015	2016	2017	2018
Suhu Udara (°C)	27,28	28,37	28.29	27.50	27.98
Tekanan Udara (mb)	1.011,1	1.011,7	1011.44	1008.24	1010.97
Kelembaban Udara (%)	77,88	72,51	75.33	79.32	70.82
Penyinaran Matahari (%)	63,06	73,43	67.49	59.08	64.17
Curah Hujan (mm)	58,76	41,06	54.84	71.83	48.58
Kecepatan Angin (knots)	3,83	4,53	4.59	4.50	4.50
Arah Angin Terbanyak	Barat Laut				

Sumber: Bps Kota palu

Suhu udara di Kota Palu selama lima tahun terakhir sedikit mengalami peningkatan, dari rata-rata 27,6°C Pada Tahun 2014 menjadi 27,98°C pada Tahun 2018. Kelembaban udara mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2014 rata-rata 77,88% menjadi 70,82% pada Tahun 2018. Kecepatan angin terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2014 rata-rata 3,83 knots menjadi 4,50 knots pada Tahun 2018. Arah angin di Kota Palu selama lima tahun terakhir umumnya bertiup dari arah Barat Laut.

1.3. Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun susunan Organisasi Pemerintah Kota Palu terdiri dari :

1. Walikota dan Wakil Walikota Palu;
2. Sekretariat Daerah
3. Sekretariat DPRD;
4. Inspektorat Daerah;
5. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
 4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja;
 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 9. Dinas Pariwisata;

10. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Dinas Pekerjaan Umum;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
 15. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 16. Dinas Lingkungan Hidup;
 17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 18. Dinas Komunikasi dan Informatika
 19. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota;
 20. Satuan Polisi Pamong Praja;
 21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
6. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 6. Rumah Sakit Umum Anutapura ;
 7. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4 Permasalahan Umum dan Isu Strategis Pemerintah Kota Palu

1.4.1. Permasalahan Umum

Urusan pemerintahan wajib, menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat di daerah tersebut. Berikut beberapa permasalahan pembangunan di Kota Palu, sebagai berikut:

1. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Palu

Permasalahan Kota Palu berhubungan dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar :

a. Pendidikan

- Mutu hasil ujian nasional rendah.
- Masih terdapat anak putus sekolah.

b. Kesehatan

- Angka harapan hidup Kota Palu mengalami penurunan.

- Rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk yang masih rendah.
- Kecukupan sarana kesehatan Puskesmas dan Pustu belum sesuai standar.
- Kurangnya upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat.
- Rendahnya akses sanitasi yang layak.

c. Pekerjaan Umum

- Kebutuhan dan kelayakan air bersih belum mencukupi dan memenuhi syarat.
- Banjir dan air yang tergenang di jalan karena tidak adanya saluran di sisi jalan mengarah ke bawah trotoar yang berlanjut ke drainase sekunder
- Sarana sosial dan hiburan masyarakat masih kurang dan tidak dikelola dengan baik.

d. Penataan Ruang dan Pertanahan

- Pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu.
- Ketidakjelasan peruntukkan ruang di Kota Palu menurut kelurahan.
- Masih banyak rumah tidak layak huni di pinggiran Kota Palu.
- Belum optimalnya pendataan pertanahan.

2. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Palu

Permasalahan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdapat di Kota Palu sebagai berikut:

a. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih kurang.
- Masih kurangnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan sampah.
- Masih kurangnya fasilitas dalam kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
- Masih kurangnya sampah yang dikelola oleh masyarakat.
- Kurangnya penghijauan di setiap pinggir jalan.
- Belum terzonafikasi pengelolaan sampah dengan baik.
- Belum ditanganinya secara baik limbah industri, manusia, dan hewan.
- Belum optimalnya pengelolaan hutan kota.

b. Perhubungan

- Belum optimalnya pelaksanaan trayek angkutan umum dalam kota.
- Kurangnya pengawasan dan penertiban angkutan umum dan barang.

c. Informatika

- Belum semua akses informasi tersedia secara realtime.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam mencapai Good Governance.
- Masih kurangnya sumber daya manusia bidang teknologi informasi komunikasi yang handal dan profesional.

d. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Belum berkembangnya industri kreatif berbasis sumberdaya lokal.
- Masih terdapat koperasi tidak aktif
- Belum adanya data dasar UMKM.

e. Statistik

- Belum terintegrasinya data seluruh OPD.
- Belum optimalnya system informasi teknologi yang digunakan dalam pendataan.
- Kurangnya komitmen pemilik data dalam upaya mengintegrasikan data sektoral.
- Sumberdaya aparatur pengelola data masih sangat kurang.

3. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan pemerintah Kota Palu.

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan Pemerintah Kota Palu di antaranya teridentifikasi sebagai berikut :

a. Kebudayaan dan Pariwisata

- Kurang tersedianya prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur pendukung pariwisata unggulan.
- Belum terkoordinasi dengan baik pembangunan objek wisata dengan lembaga dunia usaha.
- Belum adanya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) Kota Palu.
- Belum optimalnya peran organisasi, birokrasi, swasta, profesi, dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- Kurangnya sumber daya manusia pariwisata.
- Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.
- Tidak terorganisirnya event seni, budaya dan pariwisata daerah.
- Belum dikembangkan ekonomi kreatif seni dan budaya.
- Belum tersedianya informasi sumber daya budaya yang akurat, terpercaya dan dapat diakses secara mudah dan cepat.
- Pengelolaan situs cagar budaya Kota Palu masih kurang.
- Belum optimalnya pembinaan pada sanggar seni.
- Mulai hilangnya nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kota.
- Tidak berjalannya adat budaya yang berlaku di dalam masyarakat.

b. Pertanian

- Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.
- Menurunnya produktivitas dan mutu hasil pertanian seperti tanaman padi, kelapa dalam dan ternak.

c. Perdagangan dan Perindustrian

- Kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian semakin menurun dalam

kurun waktu tiga tahun terakhir.

- Belum tumbuhnya investasi berbasis potensi sumberdaya local yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan penunjang pemerintah Kota Palu.

Permasalahan pembangunan daerah berkaitan urusan penunjang pemerintah Kota Palu dengan sebagai berikut :

a. Perencanaan

- Masih belum sinkronnya perencanaan teknokratik dengan perencanaan hasil aspirasi masyarakat.
- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan perencanaan Musrenbang.
- Kurang terakomodirnya hasil usulan masyarakat dalam Musrenbang.
- Belum tersedianya basis data yang valid untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan.
- Kurangnya pemahaman dalam mensinkronkan perencanaan Oraginasasi Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.

b. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

- Belum maksimalnya upaya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
- Masih relatif kecilnya proporsi pendanaan untuk pendidikan aparatur daerah.

1.4.2. Isu Strategis Pemerintah Kota Palu

Berdasarkan permasalahan umum Pemerintah Kota Palu sesuai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kota sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka dapat diuraikan beberapa isu strategis Pemerintah Kota Palu, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Daerah
2. Pembangunan Pendidikan berkualitas dan Terjangkau
3. Pembangunan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau
4. Kemiskinan Kota
5. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perkotaan
6. Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Daerah
7. Pengembangan Sistem Transportasi Umum
8. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota Berbasis Budaya
9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Pemukiman Kota
10. Pembangunan Berbudaya Dan Beradat

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016 – 2021. IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan terhadap sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun IKU Pemerintah Kota Palu ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	2	3
1	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah Angka harapan lama sekolah
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka harapan hidup
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis kelompok kluster	Kontribusi Kategori industri pengolahan terhadap PDRB
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Opini laporan keuangan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat Rasio sampah tertangani Cakupan layanan Transportasi Kota Indeks kualitas lingkungan hidup Rasio jalan kondisi mantap
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana	Indeks resiko bencana
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	Indeks kerukunan beragama Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, maka sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2018 sebagai berikut :

- Misi 1 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 1 (satu) indikator kinerja
- Misi 2 terdapat 2 (dua) sasaran, dan 3 (tiga) indikator kinerja
- Misi 3 terdapat 2 (dua) sasaran, dan 2 (dua) indikator kinerja
- Misi 4 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 4 (empat) indikator kinerja
- Misi 5 terdapat 2 (dua) sasaran, dan 6 (enam) indikator kinerja
- Misi 6 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 2 (dua) indikator kinerja

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Palu Tahun 2018, merupakan tolok ukur pengukuran capaian kinerja Tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PK terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Gambaran Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2018 dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Palu
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	77,77%
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah Angka harapan lama sekolah	11,33 16,20
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	70,31
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	13,90
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	7,1
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Opini Laporan Keuangan	77,48 (Baik) 3,0000 WTP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		Nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	CC
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	86% (18 kw)
		Rasio sampah tertangani	65%
		Cakupan layanan Transportasi Kota	79,10%
		Indeks kualitas lingkungan hidup	87,49
		Rasio jalan kondisi mantap	75%
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana	Indeks resiko bencana	119,54
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	Indeks kerukunan beragama	71
		Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya	25

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palu

3.1.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018.

Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2018 di gambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian IKU Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Rumus/Penjelasan
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	77,77%	77,77%	Hasil survei dibagi pemetaan potensi dikali 100 %
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11,33	11,33	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke-}i)$ <p>dengan:</p> <p>P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas</p> <p>Lama sekolah penduduk ke-i =</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak pernah sekolah = 0 Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -
		Angka harapan lama sekolah	16,20	16,20	<p>Formula → $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$</p> <p>Keterangan:</p> <p>HLS_a^t Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>P_i^t Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p> <p>i Usia (a, a + 1, ..., n)</p> <p>FK Faktor koreksi pesantren</p>
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	70,31	70,31	Jumlah umur orang yang meninggal / jumlah orang yang meninggal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Rumus/Penjelasan
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	13,90	13,90	Harga = (nilai rata-rata / 100)*PDRB tahun 2015
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	7,1	7,1	Harga = (nilai rata-rata / 100)*PDRB tahun 2015
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	77,48 (Baik)	77,48 (Baik)	Rata-rata nilai IKM OPD/unit pelayanan publik
		Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	3,0000	3,0000	Nilai indeks capaian kinerja (ICK) dan nilai kesesuaian materi (IKM) 0%
		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	Hasil penilaian BPK
		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	CC	CC	Hasil penilaian KEMENPAN-RB
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	86% (18 kw)	86% (18 kw)	Jumlah kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat / jumlah seluruh kawasan x 100%
		Rasio sampah tertangani	65%	65%	Jumlah sampah tertangani / jumlah produksi sampah di Kota Palu x 100%
		Cakupan layanan Transportasi Kota	79,10%	79,10%	Jumlah titik parkir x jumlah pelayanan angkutan masal x 100 jumlah lintas trayek x 100/3
		Indeks kualitas lingkungan hidup	87,49	87,49	IKLH
		Rasio jalan kondisi mantap	75%	75%	Jumlah jalan dalam kondisi mantap / jumlah di Kota Palu x 100%
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana	Indeks resiko bencana	119,54	119,54	IRB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Rumus/Penjelasan
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	Indeks kerukunan beragama	71	71	Nilai indek kerukunan beragama berdasarkan variabel dan indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama
		Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya	25	25	Jumlah kebijakan, <i>policy brief</i> (kebijakan khusus) dan inovasi yang dirumuskan dan dilakukan pemerintah daerah untuk mengembangkan budaya dan kearifan lokal daerah

Sumber data : BPS Kota Palu diolah dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu

3.2 Pencapaian Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Perumusan Indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Adapun predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Nomor Evaluasi	Skala nilai (%)	Kesimpulan
1	85–100	Sangat Berhasil
2	70–85	Berhasil
3	55 – 70	Cukup Berhasil
4	< 55	Tidak Berhasil

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Interval (%)			
			Target	Realisasi	<55	55-70	70-85	85-100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	77,77%	77,77%				√
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11,33	11,33				√
		Angka harapan lama sekolah	16,20	16,20				√
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	70,31	70,31				√
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	13,90	13,90				√
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	7,1	7,1				√
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	77,48 (Baik)	77,48 (Baik)				√
		Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	3,0000	3,0000				√
		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP				√
		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	B	CC		√		
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	86% (18 kw)	86% (18 kw)				√
		Rasio sampah tertangani	65%	65%				√
		Cakupan layanan Transportasi Kota	79,10	79,10			√	
		Indeks kualitas lingkungan hidup	87,49	87,49				√
		Rasio jalan kondisi mantap	75%	75%			√	
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana	Indeks resiko bencana	119,54	119,54				√
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	Indeks kerukunan beragama	71	71				√

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Interval (%)			
			Target	Realisasi	<55	55-70	70-85	85-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya	25	25				√

Sumber data : BPS Kota Palu dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu

3.3 Evaluasi Capaian Sasaran Strategis

Sasaran 1 :

“Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS”

Tabel 3.3

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	77,77%	77,77%	100%

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator kinerja persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi pemetaan hasil potensi sumberdaya Kota Palu berbasis GIS persentase ketersediaan dokumen hasil survey dan pemetaan potensi, dari 13 sektor potensi daerah yang ditargetkan dalam kegiatan survey dan pemetaan potensi, hingga tahun 2019 telah direalisasikan sebanyak 8 dokumen potensi sumber daya daerah dari target kinerja sebanyak 10 dokumen. Demikian pula pada indikator persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi yang dapat diakses melalui sistem informasi berbasis GIS, dari 8 sektor potensi sumber daya hasil survey dan pemetaan tahun 2018, penyajian informasi yang dapat diakses melalui system informasi berbasis GIS (www.palukota.go.id) melalui jaringan teknologi informasi (infrastruktur IT).

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 dengan indikator kinerja utama persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi yang dapat diakses melalui sistem informasi berbasis *Geografis Information System* (GIS). Berdasarkan hasil survei dan pemetaan yang telah dilaksanakan bahwa potensi sumber daya yang dimaksud adalah potensi pertanian, kependudukan, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), lingkungan hidup, persampahan, infrastruktur, perdagangan dan industri, perhubungan dan jasa keuangan.

Pengembangan yang telah terealisasi yaitu 8 potensi dari 13 potensi sumberdaya yang dikembangkan adalah potensi pertanian, kependudukan, sosial budaya, pendidikan, kesehatan,

pariwisata, UMKM dan lingkungan hidup. Potensi sumberdaya ini dilakukan secara bertahap hingga tahun 2020.

Kegiatan ini berupa jaringan bandwidth dedicated untuk OPD dan Kelurahan namun peralatan pendukung seperti laptop banyak yang hilang dan rusak pasca bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi, Kegiatan ini berupa pembuatan website kelurahan se - Kota Palu namun kegiatan ini direvisi karena kegiatan yang sama sudah ada di BALITBANGDA.

Sasaran 2 :

”Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan“

Tabel 3.4

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka rata-rata lama sekolah	11,33	11,33	100%
2	Angka harapan lama sekolah	16,20	16,20	100%

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 dengan sasaran strategis Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dengan “indikator kinerja Angka rata-rata lama sekolah dan Angka harapan lama sekolah angka capaian kinerja sasarnya sebesar 100% dengan predikat berhasil.

Sasaran 3

“Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan”

Tabel 3.5

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka harapan hidup	70,31	70,31	100%

Angka harapan hidup merupakan rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa dan/atau banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata angka harapan hidup penduduk Kota Palu adalah 70 tahun. Hal ini disebabkan peran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palu yang menerapkan berbagai program dan kegiatan kesehatan, baik berskala nasional maupun daerah guna menunjang angka harapan hidup.

Hal ini dapat dilihat dari segi perbaikan gizi masyarakat dan sosialisasi PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) kepada masyarakat yang terlaksana dengan baik.

Sasaran 4 :

”Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB“

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	13,90	13,90	100%

Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2018 dengan indikator kinerja kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat **Berhasil**. Hal ini disebabkan banyaknya intervensi program dan kegiatan dibidang pertanian sehingga mempengaruhi sektor perdagangan.

Sasaran 5 :

”Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster“

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	7,1	7,1	100%

Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2018 dengan indikator kinerja kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB, angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat **Berhasil**. Hal ini disebabkan karena meningkatnya peran usaha mikro kecil dan menengah yang melibatkan masyarakat ekonomi lemah.

Sasaran 6 :

”Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi“

Tabel 3.8

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	77,48 (Baik)	77,48 (Baik)	100%

Hasil evaluasi indikator kinerja Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat Kota Palu di tahun 2018, angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % (**Berhasil**).hal ini disebabkan karena pelayanan publik dikota palu berdasarkan hasil survei mengalami peningkatan. Sebagai contoh pada tahun 2018 RSUD Anutapura ditetapkan sebagai rumah sakit akreditasi B.

Tabel 3.9

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2	Nilai laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,0000	3,0000	100%

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan indikator kinerja Nilai laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, realisasi capaian kinerja berdasarkan hasil penilaian Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) memperoleh **Skor 3,0000**.

Adapun indikator kinerja *nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah*, capaian realisasi 3,0000 dari target 3,0000, nilai ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian tim nasional. Kota Palu berada di urutan ke-63 dari 93 Kota untuk peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional, penilaian ini berdasarkan indeks komposit dari 2 (dua) variabel utama yaitu indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi, adapun aspek dari penilaian tersebut adalah : (a) kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan; (b) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; (c) tingkat capaian SPM; (d) penataan kelembagaan daerah; (e) pengelolaan kepegawaian daerah; (f) perencanaan pembangunan daerah; (g) pengelolaan keuangan daerah; (h) pengelolaan barang milik daerah; dan (i) pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

Tabel 3.10**Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP

Hasil evaluasi indikator kinerja opini laporan keuangan pemerintah Kota Palu di tahun 2018 mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Capaian sasaran ini diperoleh dari Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap indikator kinerja *indeks reformasi birokrasi*, realisasi dengan predikat CC dari target CC. Adapun yang menjadi indikator penilaian adalah : (1) manajemen perubahan; (2) penataan peraturan perundang-undangan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan tatalaksana; (5) penataan sistem manajemen SDM; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 3.11**Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
4	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	B	CC	CC

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap indikator Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan predikat CC dari target B Berbagai rekomendasi perbaikan yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti secara menyeluruh;

1. Secara umum Pemerintah Kota Palu belum secara intensif melakukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berbagai komponen sebagaimana disebutkan dalam tabel diatas, masih mengandung banyak kelemahan yang antara lain meliputi :
 - a. Ketepatan berbagai rumusan unsur – unsur kunci dalam perencanaan, seperti tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target;
 - b. Ketepatan menentukan target target jangka pendek dan jangka panjang;
 - c. Keselarasan penjabaran tujuan dan sasaran oleh setiap satuan kerja ke dalam perjanjian kinerja disertai dengan target targetnya serta system pengukurannya;
 - d. Monitoring terhadap pencapaian target-target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja;

- e. Penyajian laporan kinerja dan system evaluasi yang mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.
2. Pemerintah Kota Palu masih berfokus pada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan output kegiatan dan belum berorientasi pada hasil (outcomes) yang memberikan manfaat pada masyarakat secara nyata. Pemerintah Kota Palu di tahun 2019 akan berkomitmen berimplementasi SAKIP menuju Kota Palu berbudaya kinerja.

Sasaran 7 :

”Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur“

Tabel 3.12

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	86% (18 kw)	86% (18 kw)	100%

Indikator Kinerja Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat jumlah *Sculpture* Berbasis Nilai budaya dan Sejarah, dari 5 buah *sculpture* yang ditargetkan, dengan realisasi yaitu 3 (tiga) buah *sculpture* berupa: 1 (satu) Monumen Nosarara Nosabatutu dan 2 (dua) buah Gerbang Kota dengan ornamen tradisional “*taiganja*” sebagai *icon* yang merepresentasikan kebudayaan Suku Kaili penduduk asli Kota Palu. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur angka capaian kinerja sarannya sebesar 100 % dengan predikat **berhasil**.

Tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan infrastruktur, pada Indikator Kinerja cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat disebabkan Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2018 telah membangun dekorasi kota dalam bentuk ornament yang bercirikan budaya yaitu Taman GOR. Ornament tersebut mencerminkan nilai toleransi, nilai kekeluargaan dan nilai gotong royong.

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 dengan Sasaran Strategis meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dengan indikator kinerja cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat dengan capaian **berhasil** di karenakan terdapat 1 Pusat Wisata berbasis religi dan 7 pusat wisata berbasis budaya. Dengan rincian wisata sebagai berikut :

1. Pusat Wisata Religi berlokasi di Jl. Sis Aljufri
2. Pusat Wisata Budaya adalah sebagai berikut :
 - a. Wisata Budaya/Sejarah :
 - Makam Pue Njidi;
 - Makam Pue Nggari;
 - Makam Pue Mantikulore;

- Makam Raja Galara.
- b. Wisata Alam :
 - Wisata Budaya Kampung Kaili (sebelum terjadi bencana);
 - Wisata Budaya Bukit Salena;
 - Wisata Budaya Uwentumbu;

Tabel 3.13

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2	Rasio sampah tertangani	65%	65%	100 %

Indikator kinerja Rasio sampah tertangani tahun 2018 mencapai 65%, disebabkan Pemerintah Kota Palu memiliki Satgas K5 pada 46 Kelurahan di Kota Palu. Dimana Satgas K5 bertugas sebagai penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan di masing-masing Kelurahan dalam bentuk Gerakan Gali Gasa.

Tabel 3.14

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3	Cakupan Layanan Transportasi Kota	79,10	79,10	100%

Hasil evaluasi dari indikator kinerja ketiga yaitu Cakupan layanan transportasi kota dengan capaian tahun 2018 sebesar 100% hal ini disebabkan karena ketersediaan terminal kota, penambahan jumlah lintasan trayek, tersedianya halte, Penataan titik parkir dan penertiban angkutan kota.

Tabel 3.15

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
4	Indeks kualitas lingkungan hidup	87,49%	87,49%	100%

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 dengan sasaran strategis Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur capaian kinerja sasarnya sebesar 100 %. Dengan menggunakan variable pengukuran : deficit perumahan, akses pasokan air, sanitasi yang baik, akses penyediaan layanan listrik, akses pendidikan, akses layanan kesehatan dan tingkat pendapatan pribadi atau rumah tangga.

Tabel 3.16**Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
5	Rasio jalan kondisi mantap	75%	75%	100

Pengukuran capaian indikator kinerja utama tahun 2018 terhadap hasil kemantapan jalan sebesar 75% adalah berdasarkan indikator tingkat kerusakan jalan sebelum dan sesudah bencana di kota palu.

Sasaran 8 :

“Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana”

Tabel 3.17**Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Terdampak Bencana**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Index Resiko Bencana	119,54%	119,54%	100

Berdasarkan indeks risiko bencana Indonesia, Sulawesi tengah memiliki skor 158 dengan kelas risiko bencana tinggi. Sedangkan Kota palu memiliki risiko multi ancaman tinggi.

Sasaran 9 :

“Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat”

Tabel 3.19**Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kerukunan Beragama	71	71	100%

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat angka capaian kinerja sasarnya sebesar 100 %.

Tercapainya sasaran strategis peningkatan nilai-nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam menjaga keserasian sosial pada indikator persentase lembaga keagamaan yang berperan dan berfungsi disebabkan :

- Terlaksananya pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan sosial kemasyarakatan dengan mendorong peran pemberdayaan masyarakat;
- Mendorong kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama

Tabel 3.20

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya lembaga seni budaya yang berperan dan berfungsi Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam aspek masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2	Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya	25	25	100 %

Indikator kinerja jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya, realisasi sejumlah 25 kebijakan yang telah dibuat dalam peraturan perundang-undangan dari target 25 kebijakan. Realisasi ini diukur dengan mempersandingkan dokumen Perubahan Renstra Setda Kota Palu Tahun 2016-2021 dengan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dari hasil persandingan tersebut target yang direncanakan 100% pada tahun 2018 memenuhi target.

3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Gambaran perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018, di uraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.21

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	% Capaian Target 2017	Realisasi Tahun 2018	% Capaian Target 2018
1	Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi sumber daya Kota Palu berbasis GIS	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	33,33%	100%	77,77%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	%	Realisasi	%
			Tahun 2017	Capaian Target 2017	Tahun 2018	Capaian Target 2018
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11,25	100%	11,33	100%
		Angka harapan lama sekolah	15,92	100 %	16,20	100 %
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	69,93	100%	70,31	100%
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	14,14	100%	13,9	100%
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	7,55	100%	7,1%	100%
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	76,77 (Baik)	100%	77,48 (Baik)	100%
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2.999	100%	3.000	100%
		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC	CC	CC	CC
7	Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	38% (8 kw)	100%	86% (18 kw)	100%
		Rasio Sampah Tertangani	60%	100%	65%	100%
		Cakupan layanan Transportasi Kota	68,50%	100%	79,10	100%
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,73	100%	87,49	100%
		Rasio Jalan Kondisi Mantap	72%	100%	75%	100%
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana	Indeks resiko bencana	119,54	100%	119,54	100%
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai	Indeks kerukunan beragama	69	100%	71	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	% Capaian Target 2017	Realisasi Tahun 2018	% Capaian Target 2018
	agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya	25	100%	25	100%

3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan Target RPJMD Tahun 2018

Target Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 dengan rincian digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Perbandingan Target Kinerja dalam RPJMD (2016 – 2021)

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2018	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2018	% Capaian target	Rumus
1	Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi sumber daya Kota Palu berbasis GIS	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	77,77%	77,77%	100%	Hasil survei dibagi pemetaan potensi dikali 100 %
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11,33%	11,33%	100%	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke-} i)$ <p>dengan:</p> <p>P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas</p> <p>Lama sekolah penduduk ke-i =</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak pernah sekolah = 0 Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2018	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2018	% Capaian target	Rumus
		Angka harapan lama sekolah	16,20%	16,20%	100%	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Formula → $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$</p> </div> <p>Keterangan:</p> <p>HLS_a^t Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>P_i^t Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p> <p>i Usia (a, a+1, ..., n)</p> <p>FK Faktor koreksi pesantren</p>
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	70,31%	70,31%	100%	Jumlah umur orang yang meninggal / jumlah orang yang meninggal
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	13,90%	13,90%	100%	Harga = (nilai rata-rata / 100)*PDRB tahun 2015
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	7,1	7,1	100%	Harga = (nilai rata-rata / 100)*PDRB tahun 2015
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	77,48 (Baik)	77,48 (Baik)	100%	Rata-rata nilai IKM OPD/unit pelayanan publik
		Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	3.000	3.000	100%	Nilai indeks capaian kinerja (ICK) dan nilai kesesuaian materi (IKM) 100%
		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	Hasil penilaian BPK

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2018	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2018	% Capaian target	Rumus
		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	CC	CC	CC	Hasil penilaian KEMENPAN-RB
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	86% (18 kw)	86% (18 kw)	100%	Jumlah kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat / jumlah
		Rasio sampah tertangani	65%	65%	100%	Jumlah sampah tertangani / jumlah
		Cakupan layanan Transportasi Kota	79,10%	79,10%	100%	Jumlah titik parkir x jumlah pelayanan angkutan masal x 100 jumlah lintas trayek x 100/3
		Indeks kualitas lingkungan hidup	87,49	87,49	WTP	IKLH
		Rasio jalan kondisi mantap	75%	75%	CC	Jumlah jalan dalam kondisi mantap / jumlah di Kota Palu x 100%
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana budaya	Indeks resiko bencana	119,54	119,54	100%	IRB
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	Indeks kerukunan beragama	71	71	100%	Nilai indek kerukunan beragama berdasarkan variabel dan indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama
		Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya	25	25	100%	Jumlah kebijakan, <i>policy brief</i> (kebijakan khusus) dan inovasi yang dirumuskan dan dilakukan pemerintah daerah untuk mengembangkan budaya dan kearifan lokal daerah

Sumber data : BPS Kota Palu diolah dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu

3.6 Faktor Penyebab yang Mempengaruhi Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja serta solusinya

Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2018 sesuai target RPJMD Tahun 2016-2021. Terjadinya bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi menyebabkan terjadi kerusakan dan kerugian di beberap sektor, diantaranya : sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi dan sektor sosial.

Solusi : melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Palu, diantaranya :

1. Rekomendasi pemulihan, masalah perumahan :
 - a. pembangunan hunian tetap, berguna sebagai pendorong untuk pemulihan ekonomi masyarakat;
 - b. diperlukan bantuan stimulan perumahan dan bantuan teknis pembangunan/perbaikan rumah;
 - c. pembangunan hunian tetap, dilakukan bersamaan dengan prasarana lingkungan pemukiman, termaksud sanitasi yang memadai;
 - d. proses relokasi mempertimbangkan, zona aman bahaya/bencana, dekat dengan rumah asal, dan dekat dengan sumber mata pencarian.
2. Rekomendasi pemulihan masalah pekerjaan dan penghidupan, yaitu:
 - a. memberikan prioritas pekerjaan baru bagi orang yang kehilangan pekerjaan;
 - b. memberdayakan tenaga lokal, melalui padat karya proyek-proyek pemerintah;
 - c. memulihkan sektor pariwisata sebagai trigger pemulihan ekonomi;
 - d. modal usaha untuk membangkitkan ekonomi lokal, terutama sektor usaha kecil dan menengah;
 - e. pelatihan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah;
3. Rekomendasi pemulihan masalah sumber pangan dan air bersih, yaitu :
 - a. Bidang air bersih :
 - Optimalisasi sumber air baku;
 - Perbaikan instalasi air bersih didaerah terdampak bencana;
 - Bantuan sarana penyimpanan;
 - Bantuan langsung air bersih;
 - Pengeboran melalui proses pengkajian kelayakan sumber air.
 - b. Bidang Pangan
 - Penyaluran bantuan keuangan untuk makanan yang melalui mekanisme pasar bisa mendorong pemulihan perekonomian, karena mendorong transaksi jual beli diwilayah terdampak bencana.
4. Rekomendasi pemulihan masalah kesehatan dan pendidikan
 - a. Pembangunan gedung sekolah dan Puskesmas yang aman;
 - b. Bantuan *trauma healing*;
 - c. Beasiswa melalui Bidikmisi untuk perguruan tinggi, misi di prioritaskan bagi korban bencana;

- d. Pengembangan kurikulum untuk kesiapsiagaan bencana;
 - e. Pelatihan bagi guru atau simulasi bencana di sekolah.
5. Rekomendasi masalah sosial, budaya, dan agama, terdiri dari:
 - a. Dukungan rasa aman dalam beribadah dan aktivitas sosial budaya;
 - b. Penyediaan peralatan dan pengembangan *soft skill* untuk aktivitas keagamaan dan aktivitas sosial;
 - c. Dukungan personil/tenaga untuk mendukung aktivitas ibadah dan sosial budaya.
 6. Rekomendasi pemulihan masalah perlindungan kelompok rentan, terdiri dari:
 - a. Rehabilitasi atau rekonstruksi rumah aman bagi kelompok rentan;
 - b. Penyuluhan dan pendampingan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan;
 - c. Pos pengaduan terutama untuk perlindungan perempuan serta kelompok pendukung bagi penyandang disabilitas;
 - d. Pemberdayaan untuk perempuan dan kaum disabilitas melalui serangkaian pelatihan dan bantuan teknis.
 7. Rekomendasi pemulihan masalah pengurangan resiko bencana, yaitu:
 - a. Penyediaan informasi tentang bencana;
 - b. Pengembangan sistem peringatan dini;
 - c. Pelatihan dan pembentukan kelompok relawan kelurahan (forum penanggulangan resiko bencana kelurahan);
 - d. Simulasi bencana;
 - e. Penyusunan rencana kontigensi;
 - f. Penyediaan fasilitas darurat.

3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang dimaksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja Tahun 2019 dengan realisasi anggaran Tahun 2018 dengan rincian realisasi capaian target kinerja Tahun 2019 pada tabel berikut :

Tabel 3.23

Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2018 dengan Realisasi Capaian Target Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2018	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2018	% Capaian target	Target Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi Anggaran 2018 (Rp)	Persentase
1	Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi sumber daya Kota Palu	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	77,77%	77,77%	100%	2.378.818.400	2.004.980.040	84,28

2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11,33%	11,33%	100%	57.090.675.031	55.911.891.724	95,19
		Angka harapan lama sekolah	16,20%	16,20%	100%			
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	70,31%	70,31%	100%	34.060.314.979	30.282.853.689	88,91
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	13,90%	13,90%	100%	4.054.463.400	3.210.998.849	79,20
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	7,1	7,1	100%	494.443.500	423.817.451	85,72
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	77,48 (Baik)	77,48 (Baik)	100%	5.598.773.450	5.255.489.794	93,87
		Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	3.000	3.000	100%			
		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP			
		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	CC	CC	CC			
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	86% (18 kw)	86% (18 kw)	100%	125.354.517.129	85.726.553.261	85,35
		Rasio sampah tertangani	65%	65%	100%			
		Cakupan Layanan Transportasi Kota	79,10	79,10	100%			
		Indeks kualitas lingkungan hidup	87,49	87,49	WTP			

		Rasio jalan kondisi mantap	75%	75%	CC			
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana Budaya	Indeks resiko bencana	119,54	119,54	100%	60.993.637.012		
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	Indeks kerukunan beragama	71	71	100%	2.503.137.000	2.457.000.800	98,16
		Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya	25	25	100%	386.401.500	374.774.100	96,99

Sumber data : Laporan Kinerja OPD Kota Palu

3.8 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2018

Berpedoman pada indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016–2021 diarahkan kepada :

1. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah
2. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari sisi belanja dengan pendekatan Rasionalitas, Realitas dan Proporsional;
4. Meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.338.505.391.883,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan :

Pendapatan sebesar Rp. 1.338.505.391.883

2. Belanja :

Belanja sebesar Rp. 1.409.741.458.899,28 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 559.552.563.509,82 dan belanja langsung sebesar Rp. 850.188.895.389,46.

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

Penerimaan sebesar Rp. 97.039.433.016,28

b. Pengeluaran

Pengeluaran sebesar Rp. 25.803.366.000

3.9 Pendapatan

Berdasarkan RPJMD Kota Palu Tahun 2016 – 2021 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada tiga pendekatan yaitu rasional, realistis dan proporsional serta mendapat dukungan dari masyarakat. Pada Tahun 2018 pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.338.505.391.883,- Adapun ikhtisar laporan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.24
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2018
Per 31 Desember 2018

URAIAN	TARGET 2018	REALISASI	%
1	2	3	4
PAD	291.911.355.716	267.401.948.490,67	91.60%
Perimbangan	917.205.284.802	910.693.127.994	99.29%
Pendapatan Lain-lain yang Sah	129.388.751.365	137.992.851.620	106.64%
Total	1.338.505.391.883	1.316.087.928.104.67	98.32%

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2018

Tabel 3.24 menjelaskan bahwa PAD tidak mencapai target dari Rp. 291.911.355.716,- dan terealisasi sebesar Rp. 267.401.948.490,67 atau mencapai 91,60% dikarenakan terjadi bencana alam yang menimpa Kota Palu pada 28 September 2018, sehingga mengurangi pendapatan daerah.

Realisasi dana perimbangan Tahun 2018 sebesar Rp. 910.693.127.994,- atau mencapai 99,29% dari target yang direncanakan. Demikian halnya realisasi pendapatan lain-lain yang sah terealisasi sebesar Rp. 137.992.851.620,- bertambah sebesar Rp. 8.604.100.255.

3.10 Belanja Daerah

Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan pendekatan rasional, realistis dan proporsional untuk mencapai visi misi pemerintah daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan dalam RPJMD. Kebijakan belanja daerah secara deskriptif dapat dituangkan ke dalam tabel 3.25 :

Tabel 3.25

Komposisi Belanja Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN 2018 SETELAH PERUBAHAN		
		Anggaran Belanja (RP)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	559.552.563.509,82	529.634.595.160	94,65%
2	Belanja Langsung	850.188.895.389,46	661.915.905.111,10	77,85%
Total Belanja		1.409.741.458.899,28	1.191.550.500.271,10	84,52%

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, 2018

Berdasarkan tabel 3.25 di atas menjelaskan bahwa belanja tahun 2018 sebesar Rp. 1.409.741.458.899,28,- yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 559.552.563.509,82,- (39,69%) dan belanja langsung sebesar Rp. 850.188.895.389,46 (60,31%), sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 1.191.550.500.271,10 yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 529.634.595.160,- (94,65%) dan belanja langsung sebesar Rp. 661.915.905.111,10 ,- (77,85%) dengan rata-rata belanja sebesar 84,52%

3.11 Pembiayaan

Pembiayaan pada struktur APBD Tahun Anggaran 2018 dilandasi atas pemikiran bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palu senantiasa harus diupayakan pelaksanaannya guna menjaga citra dan wibawa Pemerintah Kota Palu khususnya kepada pemberi pinjaman dan umumnya kepada masyarakat.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.26 :

Tabel 3.26**Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 Setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Penerimaan Pembiayaan	97.039.433.016,28	97.221.420.670,96	100,18%
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25.803.366.000	25.747.937.000	99,79%

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, 2018

Berdasarkan Tabel 3.26 di atas penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2018 yang ditargetkan sebesar Rp. 97.039.433.016,28,- terealisasi sebesar Rp. 97.221.420.670,96,- atau 100,18% dan pengeluaran pembiayaan daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 25.803.366.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.747.937.000,- atau 99,79%.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Palu telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian dari 9 (sembilan) sasaran strategis yang mencakup 18 (delapan belas) indikator kinerja.

Beberapa langkah antisipatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2018 merupakan bagian dari upaya mencapai visi dan misi, tujuan, serta sasaran strategis, sebagaimana yang telah dijanjikan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palu. Adapun langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Palu sebagai berikut :

1. Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasian data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik di setiap kecamatan;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas;
4. Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan
5. Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata;
6. Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis budaya;
7. Meningkatkan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastruktur berbasis budaya;
8. Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Palu, antara lain rekomendasi pemulihan masalah perumahan, masalah sumber pangan dan air bersih, masalah kesehatan dan pendidikan, masalah sosial, budaya, dan agama, masalah perlindungan kelompok rentan dan masalah pengurangan resiko bencana.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota palu tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta, dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Demikian penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2018 sebagai bahan evaluasi dan penilaian kinerja Pemerintah Kota Palu ke depan guna mewujudkan Kota Palu yang berakuntabilitas. Semoga laporan kinerja Instansi Pemerintah

Kota Palu tahun 2018 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.



**PERUBAHAN PERJANJIAN
KINERJA PEMERINTAH PALU
TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Hidayat, M.Si**

Jabatan : **Wali Kota Palu**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, Oktober 2018

WALI KOTA PALU

Drs. HIDAYAT M.Si

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PALU TAHUN 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	77,77%
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11,33
		Angka harapan lama sekolah	16,20
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	70,31
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	13,90
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	7,1
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	77,48 (Baik)
		Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	3,0000
		Opini Laporan Keuangan	WTP
		Nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	CC
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	86% (18 kw)
		Rasio sampah tertangani	65%
		Cakupan Layanan Transportasi Kota	79,10%
		Indeks kualitas lingkungan hidup	87,49
		Rasio jalan kondisi mantap	75%
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana	Indeks resiko bencana	119,54
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	Indeks kerukunan beragama	71
		Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya	25

Palu, Oktober 2018

WALI KOTA PALU

Drs. HIDAYAT M.Si

NO	PROGRAM	RP	ANGGARAN
1	Penerapan dan Pengoperasian Teknologi	RP	2,633,260,000
2	Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	RP	34,410,000
3	Studi dan Penelitian	RP	0
4	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	RP	5,231,014,000
5	Manajemen Pelayanan Pendidikan	RP	0
6	Wajib Belajar sembilan Tahun	RP	55,261,658,345.75
7	Pengembangan Pendidikan Non Formal	RP	388,551,300
8	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RP	2,704,296,000
9	Palu Kana Mapande	RP	3,858,745,000
10	Obat dan Perbekalan Kesehatan	RP	8,736,568,422
11	Upaya Kesehatan Masyarakat	RP	13,958,593,470
12	Pengawasan Obat & Makanan	RP	118,836,500
13	Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	RP	873,944,800
14	Perbaikan Gizi Masyarakat	RP	699,372,000
15	Pengembangan Lingkungan Sehat	RP	64,279,000
16	Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular	RP	706,335,250
17	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	RP	286,773,300

NO	PROGRAM	RP	ANGGARAN
18	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	RP	144,000,000
19	Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	RP	8,968,171,143
20	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	RP	0
21	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	RP	258,875,000
22	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak	RP	1,777,259,440
23	Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan	RP	0
24	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	RP	130,000,000,000
25	Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	RP	21,044,745,000
26	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	RP	2146846500
27	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	RP	-
28	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	RP	1084745000
29	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	RP	85,606,000
30	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	RP	363,277,500
31	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	RP	43,360,000
32	Pengembangan Kemitraan	RP	1,013,075,500

NO	PROGRAM	RP	ANGGARAN
33	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	RP	4,777,587,790
34	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	RP	4,272,473,700
35	Perencanaan Pembangunan Daerah	RP	2,569,550,500
36	Pengembangan Aparatur Negara	RP	1,719,103,500
37	Reformasi Birokrasi	RP	23,423,000
38	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah	RP	1,144,622,500
39	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	RP	321,465,000
40	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	RP	1,656,168,950
41	Peningkatan Pelayanan Angkutan	RP	2,660,803,900
42	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	RP	467,573,098.80
43	Perencanaan Tata Ruang	RP	2,545,792,020
44	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	RP	199,784,500
45	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RP	3,512,880,258
46	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	RP	1,958,286,000
47	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	RP	12,961,787,950

NO	PROGRAM	RP	ANGGARAN
48	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	RP	876,215,600
49	Pengembangan Destinasi Pariwisata	RP	81,924,000
50	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	RP	3,357,784,500
51	Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata	RP	0
52	Pembangunan Jalan dan Jembatan	RP	60,283,805,728
53	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	RP	17,040,243,170
54	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	RP	10,458,025,000
55	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	RP	7,678,012,000
56	Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	RP	346,205,600
57	Lingkungan Sehat Perumahan	RP	7,955,148,000
58	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	RP	7,555,282,960
59	Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	RP	213,312,000
60	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	RP	2,409,128,000
61	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	RP	248,340,000
62	Palu Nobudaya Ante Noda	RP	419,751,500



PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2018 DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH KOTA PALU KATEGORI PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TERBAIK 1 TINGKAT KOTA



PIAGAM PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT KOTA 2018



Kota Palu Meraih Penghargaan Peringkat Pertama Kota dengan Perencanaan Pembangunan Terbaik se-Indonesia, yang diserahkan langsung kepada Walikota Palu, Drs. Hidayat, M.Si oleh Presiden RI Ir.Joko Widodo dalam acara Musrebangnas di Jakarta yang bertempat di hotel Grand Sahid Jaya. Sungguh ini merupakan Prestasi yg Sangat Membanggakan bagi masyarakat Kota Palu.



Kota Palu dinobatkan sebagai kota terbaik di Sulawesi Tengah pada Penganugerahan Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards 2018 yang digelar di Jakarta, Jumat (20/7/2018). Kota yang memiliki pesona alam empat dimensi yakni teluk, sungai, bukit, dan gunung tersebut dinilai lebih unggul dari 12 kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Penghargaan Yokatta ini diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya kepada Wali Kota Hidayat. Dalam hal ini, Menpar didampingi Pimpinan Umum Yokatta News, Yong Keng Hoat.



Wali Kota Palu diwakili Asisten III bid. Administrasi Umum, Bpk. Muchlis Umar saat menghadiri menerima Piagam Penghargaan dari Gubernur Longki kepada Pemerintah kota Palu atas Penerapan Layanan Respon Cepat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Gempa, Tsunami, dan Likuifaksi 28 September 2018 Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Upacara HUT Satpol PP ke-69, Satlinmas ke-57, dan Damkar ke-100 pada Rabu, 20 Maret 2019 di Lapangan Tribun Ex. STQ, Kota Palu.



Wali Kota Palu Drs. Hidayat, M.Si menerima Piala serta Piagam Penghargaan yang diserahkan langsung Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Longky Djanggola, M.Si atas prestasi juara II tingkat provinsi Sulawesi Tengah, tentang Penilaian Perencanaan Dan Pelaksanaan RKPD, Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2018. Penyerahan ini dilaksanakan di Santika Hotel, Kamis (29/3) pada saat pelaksanaan Musrenbang provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018.

